

Artikel Info-1

by Pwincess Belle

Submission date: 26-May-2024 02:16AM (UTC+0100)

Submission ID: 234912148

File name: Artikel_Info-1.docx (44.82K)

Word count: 2968

Character count: 20634

Artikel Info**Genesis Artikel:**

Kata Kunci:

Implementasi
Kebijakan, Program
Bantuan Biaya
Pendidikan,
Pemerintah
Kabupaten Blitar

Keywords:

Policy
Implementation,
Education Fee
Assistance
Program, Blitar
Regency
Government

ABSTRAK

Kualitas sumber daya manusia adalah pondasi penting untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kualitas sumber daya adalah rata-rata pendidikan yang ditamatkan, dan Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan pendidikan sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses implementasi kebijakan program bantuan biaya pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Penelitian dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program sesuai dengan kebijakan, meskipun terdapat hambatan pada variabel sumber daya dan komunikasi antar organisasi. Faktor pendukung utama adalah tujuan yang jelas serta komitmen agen pelaksana.

ABSTRACT

The quality of human resources is a crucial foundation for improving the standard of living and the welfare of society. One indicator of human resource quality is the average level of education completed, and Indonesia has a low education level. The Blitar Regency Government is committed to addressing this issue by providing educational assistance in accordance with Blitar Regent Regulation Number 149 of 2022. This study aims to understand the process of implementing the educational assistance program policy and the factors influencing it, using the Van Meter and Van Horn model. The research was conducted at the Secretariat of Blitar Regency using a qualitative method through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the program implementation aligns with the policy, although there are obstacles in the variables of resources and inter-organizational communication. The main supporting factors are clear objectives and the commitment of the implementing agents.

PENDAHULUAN

Kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pendidikan. Pendidikan adalah landasan penting dalam membangun peradaban bangsa. Pendidikan yang bermutu dan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 4 Pembukaan Pendidikan Tahun 1945, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.

Pendidikan tinggi berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Indonesia masih perlu membenahi sektor pendidikan. Program beasiswa dari pemerintah membantu masyarakat kurang mampu. Implementasi kebijakan yang tepat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Survei PISA 2019 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara, mencerminkan masalah kualitas pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan lima masalah utama dalam pendidikan di Jawa Timur: percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di peringkat 15 nasional dengan nilai 71,5, tingginya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah dan lembaga, kualitas, kuantitas, dan distribusi tenaga pendidik yang belum optimal,

angka partisipasi pendidikan khusus dan layanan bagi anak penyandang disabilitas yang masih kurang, serta rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Faktor utama penghambat penyelesaian pendidikan formal adalah kemiskinan, yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Herlina (2017) menegaskan hubungan antara kemiskinan dan pendidikan, serta penelitian Airlanda (2016) menunjukkan bahwa komunikasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan mempengaruhi implementasi program.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan 51,74% anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 7,31% penduduk Jawa Timur yang melanjutkan pendidikan hingga taraf perguruan tinggi. Proporsi terbesar pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SD atau lebih rendah (22,02% tidak memiliki ijazah), sementara 24,21% menyelesaikan SMA/ sederajat.

Di Kabupaten Blitar, berbagai upaya telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk penerapan kurikulum merdeka, program Sekolah Sak Ngajine, perbaikan sarana prasarana, dan penurunan angka putus sekolah. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran dan pergantian kurikulum masih ada. Pada 2022 dan 2023, pemerintah meraih penghargaan atas kinerja positif dalam bidang pendidikan dan penghapusan tiga dosa besar (intoleransi, bullying, dan pelecehan seksual).

Upaya peningkatan sarana prasarana terutama di wilayah Blitar Selatan terus dilakukan, termasuk mendata dan melengkapi kebutuhan sekolah. Program pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Paket A, B, dan C telah meluluskan sekitar 700 siswa. Pemerintah daerah juga memberikan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) yang meningkat dari 5000 siswa pada 2022 menjadi 14.000 siswa pada 2023, serta menyediakan seragam gratis dengan anggaran Rp 4 miliar (Syafi'udin, 2024). Data tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengaturan alokasi anggaran pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, termasuk pengalokasian APBN dan APBD untuk pendidikan, masing-masing minimal 20% dari belanja negara dan belanja daerah, serta hibah dana pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah.

Pemberian bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Blitar bagi mahasiswa pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan jumlah pendaftar dan penerima. Pada tahun 2022, ada 78 pendaftar dan 75 penerima, sementara pada tahun 2023, ada 1.119 pendaftar dan 957 penerima. Anggaran beasiswa dari APBD untuk tahun 2022-2024 adalah Rp 12,5 miliar, dengan penurunan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 2,5 miliar.

Pemberian bantuan ini diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022, yang mengubah Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu. Program ini merupakan bagian dari visi misi Bupati Blitar untuk memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat desa sebagai upaya pengembangan SDM. Implementasi bantuan pendidikan mengikuti kriteria dan syarat yang ditentukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran..

19

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami temuan secara mendalam melalui keterlibatan langsung peneliti dalam proses penelitian, mulai dari penyusunan pertanyaan, pengumpulan data, hingga analisis data. Fokus penelitian mencakup proses implementasi kebijakan pemberian bantuan biaya pendidikan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dilengkapi data sekunder dari dokumen terkait. Instrumen utama adalah peneliti, didukung pedoman wawancara, catatan, dan alat rekam. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model Huberman melalui pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan verifikasi data. Uji keabsahan data melibatkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas untuk memastikan validitas dan objektivitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Blitar menjamin dan meningkatkan efektivitas pemberian bantuan

biaya pendidikan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu. Peraturan ini memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan, memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran dan terstruktur.

Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya

Pelaksanaan kebijakan adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, program yang terencana, serta ketersediaan dana (Kusumajati & Kurniawan, 2019). Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat menjadi dasar implementasi kebijakan, standar, ukuran, dan tujuan kebijakan. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Bagian Kesra) mempunyai tugas mengelola program pemberian bantuan biaya pendidikan, dengan Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksana. Program ini diatur dalam Perbup Blitar Nomor 149 Tahun 2022, yang menetapkan ketentuan untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran. Kepala Bagian Kesra dan Kepala Sub Bagian Kesra menegaskan bahwa program ini mengikuti SOP sesuai Perbup tersebut untuk memastikan aturan yang terstruktur.

Selain standarisasi, tujuan kebijakan mendukung pendidikan dan keselarasan implementasi program. Program ini memiliki ketentuan rinci untuk menentukan penerima bantuan, termasuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Standar dan tujuan kebijakan dalam Perbup Blitar Nomor 149 Tahun 2022 memudahkan implementasi dan meningkatkan efektivitas serta ketepatan sasaran program.

Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan standar dan tujuan kebijakan dalam program bantuan biaya pendidikan melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur posisi aparat pemerintah, struktur organisasi, fungsi program, sasaran penerima, bentuk bantuan, ketentuan penerima, sistem penyaluran informasi, dan tim pelaksana program, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa indikator kinerja menilai capaian standar dan tujuan kebijakan tercapai menurut Van Meter dan Van Horn (1975).

Penetapan standar dan sasaran kebijakan ini menjadi kunci keberhasilan implementasi, tergantung pada sejauh mana mereka direalisasikan sesuai dengan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan ini sesuai dengan kondisi tersebut, dengan antusiasme masyarakat Kabupaten Blitar, khususnya para mahasiswa penerima bantuan. Didukung temuan Anggraini (2024), sasaran kebijakan adalah panduan untuk memperlancar proses implementasi, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi program.

Sumber Daya

Indikator kedua dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Menurut Van Meter dan Van Horn, ada tiga jenis sumber daya yang penting: sumber daya manusia, sumber daya biaya, dan sumber daya waktu. SDM merujuk pada aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, sumber daya biaya mencakup anggaran untuk mendukung program, dan sumber daya waktu melibatkan perencanaan sebelum pelaksanaan program. Berikut adalah data anggaran program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu:

Tabel 1. Besaran Anggaran Biaya Program Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2022-2024

Tahun	Besar Anggaran	Perolehan	Jumlah Pendaftar	Jumlah Penerima
2022	Rp 5.000.000.000	Prestasi: Rp 5.000.000	78	75
		Kurang Mampu: Rp 2.500.000		
2023	Rp 2.500.000.000	Prestasi: 2.647.000	1119	957

		Kurang Mampu: Rp 2.500.000		
2024	Rp 5.000.000.000	Dalam proses pelaksanaan	1945	-

Sumber: Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan ini didukung oleh sumber daya yang mencakup dana pemerintah, jumlah staf atau pelaksana dengan kemampuan teknis dan material yang baik, waktu, serta sarana dan prasarana/fasilitas yang meliputi dana dan infrastruktur lainnya, *stakeholders*, dan wewenang para pelaksana.

Besaran anggaran untuk program bantuan biaya pendidikan bervariasi tiap tahun. Pada tahun 2022, anggaran sebesar Rp. 5 miliar, dengan perolehan jalur prestasi Rp. 5.000.000 per orang dan mahasiswa kurang mampu Rp. 2.500.000 per orang untuk total 75 penerima. Pada tahun 2023, anggaran turun menjadi Rp. 2,5 miliar, dengan perolehan mahasiswa prestasi Rp. 2.647.000 per orang dan mahasiswa kurang mampu Rp. 2.500.000 per orang untuk total 957 penerima. Anggaran tahun 2024 tetap sama dengan tahun 2022, yaitu Rp. 5 miliar, dengan implementasi program masih dalam proses.

5 Sumber daya dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk keberhasilannya, mencakup sumber daya manusia, sumber daya biaya, dan sumber daya waktu. Pemkab Blitar telah membentuk struktur organisasi dan mengalokasikan anggaran untuk program bantuan biaya pendidikan, meskipun besaran anggaran bervariasi setiap tahun. Informasi resmi dan *road-map* pelaksanaan program diumumkan melalui website Pemkab Blitar. Keberhasilan implementasi juga bergantung pada ketersediaan sumber daya yang mendukung, seperti dana atau insentif lainnya (Meter, V., & Horn, V., 1975). Dalam penelitian ini, keberhasilan implementasi bergantung pada kesesuaian dan ketersediaan sumber daya manusia, biaya, dan waktu secara berkesinambungan.

11

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah variabel penting dalam keberhasilan implementasi program, meliputi struktur birokrasi, norma-norma yang dianut, dan pola komunikasi. Struktur organisasi yang jelas membantu agen pelaksana meningkatkan efisiensi operasional, fokus pada tugas produktif, dan membagi tanggung jawab dengan tepat. Di Kabupaten Blitar, struktur birokrasi inti mencakup Bupati sebagai pelindung, Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana, Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai wakil ketua pelaksana, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai sekretaris pelaksana, didukung oleh anggota lain seperti perencana Inspektorat, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Staf Analis.

Implementasi program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu dianalogikan seperti mesin yang diminyaki dengan baik, mencerminkan persiapan matang dari birokrasi dalam memfasilitasi agen pelaksana untuk mencapai efisiensi dan kejelasan dalam pelaksanaan tugas. Karakteristik implementor yang tertentu mencerminkan keberhasilan kebijakan yang dirancang. Menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975), karakteristik, norma, dan pola hubungan dalam lembaga eksekutif berpotensi mempengaruhi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat merubah kebiasaan masyarakat, sehingga implementor harus mempertimbangkan apakah kebijakan harus kaku atau fleksibel. Pemkab Blitar menerapkan kebijakan pendidikan yang lembut, menunjukkan adaptabilitas dalam pelaksanaannya.

Sikap/Disposisi Para Pelaksana

Sikap para implementor sebagai pelaksana kebijakan mempengaruhi keberhasilan program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Blitar bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Disposisi pelaksana tercermin dalam respon terhadap kebijakan, pemahaman tentang isi kebijakan, dan intensitas respon setelah memahaminya. Wawancara dengan Kepala Bagian Kesra dan Kepala Subbagian Kesra, menunjukkan bahwa staf di Bagian Kesra menerima program dengan baik, memahami kebijakan, dan mengerti tugas masing-masing. Kesenjangan antara pembuat kebijakan dan implementor harus dihindari agar program dapat berhasil optimal.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh disposisi pelaksana dalam merespons kebijakan

tersebut. Bagian Kesra beserta staf di Pemkab Blitar merespons kebijakan bantuan biaya pendidikan dengan baik, memastikan tidak ada kesenjangan antara pembuat kebijakan dan implementor untuk mencapai keberhasilan maksimal. Respon, pemahaman, dan intensitas dari implementor dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan lainnya (Meter, V., & Horn, V., 1975). Penelitian ini menunjukkan bahwa respon Pemkab Blitar terhadap kebijakan ini sangat baik, dengan pemahaman yang baik tentang isi kebijakan dan intensitas yang tinggi dalam menanggapi. Temuan ini selaras dengan penelitian Supriyatno (2010) yang menekankan bahwa sikap implementor secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

dalam keberhasilan implementasi program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Blitar, komunikasi antar organisasi dan para pelaksana adalah salah satu indikator penting. Koordinasi antar instansi memegang peran krusial dalam menentukan efektivitas kinerja program. Hasil wawancara dengan staf Bagian Kesejahteraan Rakyat menunjukkan bahwa interaksi dan koordinasi antar tim seleksi berjalan baik, membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi dilakukan melalui publikasi informasi di *website* dan media sosial Pemkab Blitar, serta fasilitasi tanya jawab melalui Instagram Bagian Kesejahteraan Rakyat. Mahasiswa penerima bantuan mengakui adanya komunikasi yang cukup baik dari pihak penyelenggara. Namun, mereka juga mencatat kekurangan dalam respons terhadap pertanyaan di grup *WhatsApp* dan transparansi awal terkait persyaratan dan nominal bantuan. Evaluasi terhadap komunikasi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan implementasi program di tahun-tahun berikutnya.

Meskipun komunikasi antar staf terjalin baik, sering terjadi kendala seperti miskomunikasi dan kesalahpahaman, terutama terkait respons lambat dari para implementor. Kurangnya transparansi terkait prosedur dan nominal bantuan juga menyebabkan penundaan dan kebingungan bagi penerima.

Komunikasi dalam dan antar organisasi merupakan proses kompleks (Meter, V., & Horn, V., 1975). Mereka menyoroti pentingnya bantuan teknis dan sanksi positif atau negatif dari atasan untuk memperkuat hubungan antar organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dapat mencerminkan ketegasan kebijakan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan proses implementasi kebijakan. Namun, kendala komunikasi seperti kurangnya transparansi dan respons yang lambat masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

7

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

11

Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan aparat pemerintah dan masyarakat. Di Kabupaten Blitar, kondisi ekonomi masyarakat berhubungan dengan anggaran program bantuan biaya pendidikan. Kondisi sosial menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program ini, dan kondisi politik mencerminkan dukungan pejabat pemerintah dalam menegakkan kebijakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik stabil dan mendukung keberhasilan program ini. Masyarakat memberikan respons positif, dan pejabat pemerintah menunjukkan dukungan kuat. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan terlihat dari besaran anggaran yang tersedia, tanggapan masyarakat, dan respons pejabat pemerintah.

Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik cukup stabil dan mendukung keberhasilan implementasi program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Blitar bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan anggaran, respons positif dari masyarakat dan mahasiswa, serta dukungan pejabat pemerintah. Teori Van Meter dan Van Horn (1975) menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga pelaksana dalam implementasi kebijakan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

Implementasi kebijakan, termasuk program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu, memiliki faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi

proses pelaksanaannya.

Faktor Pendukung

Tujuan dan kepentingan dalam proses implementasi program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Blitar bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan derajat perubahan hidup. Program ini sejalan dengan penelitian Rahmawati yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan pengurangan angka kemiskinan. Komitmen dan konsistensi pelaksana kebijakan oleh staf pemerintahan Kabupaten Blitar juga mendukung lancarnya proses implementasi kebijakan. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh komitmen dan konsistensi yang baik dari para pelaksana, yang sesuai dengan temuan Handityasa & Purnaweni (2020) bahwa komitmen yang baik mendukung lancarnya proses pelaksanaan kebijakan.

Faktor Penghambat

Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bagian Kesra Pemkab Blitar menghambat proses implementasi kebijakan, terutama dalam verifikasi berkas dan pengumuman uji publik. Solusinya, Pemkab menambah tim verifikasi dan mahasiswa magang. Kurang Memaksimalkan Strategi Implementasi kebijakan bantuan biaya pendidikan kurang memaksimalkan strategi yang sudah dirancang, mengakibatkan proses implementasi tidak optimal. Hambatan Komunikasi dan Kurangnya Transparansi dalam implementasi program bantuan biaya pendidikan, terdapat revisi ketentuan berkas dan kurangnya transparansi waktu serta informasi nominal bantuan, mengakibatkan ketidakpastian dan kebingungan bagi penerima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi program program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Blitar bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu menurut Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dikatakan berhasil, dapat dilihat melalui enam variabel. Pertama, yakni sasaran dan standar kebijakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, yakni ketersediaan sumber daya biaya dan sumber daya waktu, walaupun sumber daya manusia masih mengalami keterbatasan. Ketiga, karakteristik para staf Kepala Bagian Kesra yang dinilai baik dan tidak terlalu keras dan rigid dalam proses implementasi. Keempat, sikap atau disposisi para pelaksana dimana kecenderungan para agen pelaksana merespon dengan baik dan sudah memiliki pemahaman yang baik tentang isi kebijakan. Kelima, yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitasnya memiliki cukup baik koordinasi antar staf pelaksana maupun antar staf dengan atasan/pejabat. Walaupun masih ada kendala di dalam komunikasi antar staf pelaksana dengan para pendaftar bantuan. Keenam, yaitu lingkungan ekonomi, sosial, politik yang kondusif dan stabil yang dibuktikan dengan ketersediaan anggaran biaya untuk melancarkan program, respon masyarakat bagus, serta pejabat pemerintah yang mendukung penuh secara kekuasaan dan wewenang terhadap program bantuan biaya pendidikan.

Terdapat beberapa faktor pendukung, diantaranya terdapat tujuan dan kepentingan yang jelas serta komitmen dan konsistensi para pelaksana program. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jumlah sumber daya manusia terbatas, para pelaksana kurang memaksimalkan strategi kebijakan, serta hambatan komunikasi antar para staf dengan pendaftar dan kurangnya transparansi waktu serta nominal perolehan bantuan.

Saran untuk implementasi kebijakan program bantuan biaya pendidikan di Kabupaten Blitar bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu adalah meninjau ulang informasi yang disebarkan terkait dengan ketentuan pendaftaran dan kebutuhan berkas, untuk meningkatkan efektivitas proses pendaftaran dan pengumpulan berkas, menambah jumlah SDM agar *road-map* pelaksanaan dapat diterapkan tepat waktu, memaksimalkan strategi kebijakan yang telah dirancang untuk program bantuan biaya pendidikan, serta meningkatkan transparansi terkait nominal bantuan agar para pendaftar mengetahui dengan jelas jumlah yang mereka terima dan menghindari kesenjangan informasi serta persepsi negatif.

Artikel Info-1

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.blitarkab.go.id Internet Source	4%
2	mediaindonesia.com Internet Source	1%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
4	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
5	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
6	www.coursehero.com Internet Source	1%
7	Rizka Dwiyo Vita, Martha Irene Kartasurya, Nurjazuli Nurjazuli. "Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) Orang Terduga Tuberkulosis di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung", Malahayati Nursing Journal, 2023 Publication	1%

8	mulok.library.um.ac.id Internet Source	<1 %
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
10	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
11	Silvi Aulia. "Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Di Kabupaten Subang", <i>The World of Public Administration Journal</i> , 2022 Publication	<1 %
12	daerah.peraturanpedia.id Internet Source	<1 %
13	bangka.tribunnews.com Internet Source	<1 %
14	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
15	ppid.blitarkab.go.id Internet Source	<1 %
16	www.djkn.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
17	bibliotecadigital.fgv.br Internet Source	<1 %
18	jabar.bkkbn.go.id Internet Source	<1 %

19	repository.unud.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.airitilibrary.com Internet Source	<1 %
21	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
22	Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, Anisa Kurniatul Azizah. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro)", Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 2021 Publication	<1 %
23	brage.bibsys.no Internet Source	<1 %
24	core.ac.uk Internet Source	<1 %
25	elib.sfu-kras.ru Internet Source	<1 %
26	kabarinews.com Internet Source	<1 %
27	Engkus Engkus, Nanang Suparman, Fadjar Trisakti, Mohammad Robby Rodhiya. "IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI	<1 %

PUBLIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG", Jurnal
Governansi, 2019

Publication

28

Wardati Wardati, Zulmasyhur Zulmasyhur,
Susanti Susanti. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM
BERDARAH DENGUE (DBD) DI KECAMATAN
TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
BARAT", JURNAL SOSIAL HUMANIORA, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off